

Tinjauan yuridis peranan Bapepam dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindakan pidana pencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Studi kasus: pembobolan dana PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Rp.1,7 Trilin)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325117&lokasi=lokal>

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentan terjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadi pada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukan penegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam. Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK. Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yang menyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapat mempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, fakta yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebut adalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PT Bank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akan membuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akan bergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikan pemegang saham khususnya dalam hal ini adalah pemegang saham minoritas yang biasanya merupakan pemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam di dalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yang karena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksi Bapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, maka kepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi. Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusaha mengkaji secara yuridis peranan Bapepam dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT Bank Negara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisa secara yuridis masalah perlindungan pemegang saham Tinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005

minoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungan dengan kasus.